

**Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 (Suatu Studi di Desa Pinabetengan Kecamatan
Tompaso Barat Kabupaten Minahasa)**

Alfonda Mewengkang¹

Marlien T. Lapian²

Ismail Sumampow³

ABSTRAK

Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatanbelanja Negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat berpartisipasi dalam pemanfaatan Dana Desa serta ikut terlibat dalam merencanakan pembangunan dan melaksanakan program-program pembangunan di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang di anggap berpotensi untuk memberi informasi tentang pemanfaatan dana desa dan pengaruh keterlibatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso Barat. Juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil pemanfaatan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan Dalam tahap pelaksanaan implementasi pembangunan infrastruktur, Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa cukup tinggi, karena melihat keadaan masyarakat Desa Pinabetengan yang memiliki budaya gotong royong yang kental dan masyarakat sudah memahami bahwa program yang dibuat tidak lain untuk kepentingan masyarakat Desa Pinabetengan sendiri.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Pembangunan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah salah satu bentuk atau cara mengambil bagian menjadi subjek atau aktor dalam pembangunan desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hasniati dkk (2017), mengenai *Participation of Coastal Communities in the Management of Funds*, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan dana dengan cara menjadi subyek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan atau pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai di biayai oleh dana desa. bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah, masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada dimiliki. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Berdasarkan analisa peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso barat, bahwa dalam proses

perencanaan masih belum terbukanya pemerintah terhadap masyarakat tidak banyak masyarakat yang tahu akan program dana desa, selanjutnya pada tahapan pelaksanaan tidak terlihat jumlah anggaran yang ditetapkan untuk satu proyek. Pada tahapan pengawasan kurangnya melibatkan masyarakat dan tidak transparannya pihak pengawasan seperti BPD dan Camat dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilakukan.

Dari data awal yang peneliti dapatkan dilapangan mengenai dana desa yang didapat oleh Desa Pinabetengan tahun 2021 sebesar Rp. 754.326.500 yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat seperti pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun bentuk partisipasi masyarakat yang terlihat dalam pemanfaatan dana desa adalah sumbangan pikiran yang diberikan saat ada kegiatan musrenbang, sumbangan tenaga dimana dalam melaksanakan kegiatan pemerintah wajib menyertakan masyarakat selain itu ada sumbangan pengawasan masyarakat agar dana desa tidak disalah gunakan.

Dari pengamatan peneliti dilapangan di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso Barat, penggunaan dana desa baik pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik masih mengalami beberapa masalah, terutama pada tingkat partisipasi masyarakat yang masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan

musyawarah tentang rencana-rencana penggunaan dana desa, terutama dalam memberikan ide dan masukan mengenai penggunaan dana desa, hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya dana desa beserta penggunaannya, sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya.

2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam bentuk tenaga maupun keahlian dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa sebagai akibat dari kurangnya kesadaran, tanggung jawab serta rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan dana desa tersebut, sehingga segala mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa diserahkan kepada pemerintah desa.
3. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam memelihara hasil-hasil penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Guna memfokuskan penelitian ini agar tidak lari dari konteks yang akan diteliti, maka peneliti menetapkan focus penelitian pada Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di desa Pinabetengan kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasadengan menggunakan teori dari Desa Menurut Adi (2010:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Assesment (Identifikasi)

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.

3. Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, p[roses, dan hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan yang dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dari instansi berupa dokumen-dokumen maupun diperoleh dari perpustakaan

Adapun informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer terdiri dari unsur pengguna dana desa dan unsur penerima manfaat dari hasil kegiatan yang dilakukan yaitu :

- Hukum Tua
- BPD 1 orang
- Tim Pelaksana Anggaran Dana Desa 2 orang
- Tokoh Masyarakat 1 orang
- Masyarakat 5 orang

Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahap, yaitu reduksi data (penyederhanaan), display data (disajikan), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan
Langkah ketiga dari analisis data adalah penarikan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi

Pembahasan

1. Tahap assesment (identifikasi)

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah. Kondisi ini terlihat dari beberapa wawancara dengan para informan.

Dari hasil wawancara kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melihat permasalahan yang sedang terjadi dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah paham terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.

Masyarakat yang datang untuk menghadiri musyawarah, sebelumnya diundang oleh pemerintah desa dan stakeholder yang lain baik dalam bentuk undangan tertulis maupun undangan lisan yang disampaikan kepada masyarakat melalui pengumuman dan penyampaian langsung oleh kepala jaga di pengeras suara di masing-masing jaga. Informasi kepada masyarakat disampaikan pada saat dipagi hari atau menjelang malam setelah masyarakat akan melaksanakan atau sudah

selesai melaksanakan pekerjaan. Walaupun dalam kenyataannya dan pada saat musyawarah tidak semua masyarakat yang diundang hadir dalam musyawarah tersebut.

Dalam proses musyawarah tersebut, dilakukan identifikasi terhadap potensi dan masalah yang ada di Desa Pinabetengan, terutama pada lingkup jaga. Masyarakat menyampaikan berbagai macam aspirasi dan kebutuhannya. Berbagai aspirasi dan pendapat tersebut, ditampung dan diolah kembali dengan memperhatikan aspek prioritas. Jadi, hal yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat menjadi prioritas utama, sedangkan hal yang belum terlalu mendesak menjadi prioritas selanjutnya. Usulan dan aspirasi yang ada bukan hanya dari masyarakat biasa, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan pengaruh yang lebih luas dibanding masyarakat lainnya.

Selain itu, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasinya melalui forum formal seperti musyawarah Jaga tersebut, tetapi juga masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya melalui forum informal seperti ketika bertemu di tempat kerja atau berpapasan di jalan.

2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Tahap ini Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa pinabetengan, pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan

tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah desa yakni melalui forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Pinabetengan yang nantinya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dapat kita lihat melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari partisipasi masyarakat tersebut menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat dilihat dalam bentuk kehadiran pada saat musyawarah, baik musyawarah di setiap jaga sampai musyawarah desa. Sumbangan pemikiran, ide-ide ataupun gagasan yang diusulkan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pada proses pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa pinabetengan.

3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) program atau kegiatan

Tahap ini Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahapan dalam proses pengelolaan

Dana Desa di desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, setelah tahap perencanaan. Dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari masyarakat kepada pemerintah desa dalam bentuk :

- Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan);
- Sumbangan materi (dana, barang dan alat);
- Sumbangan tenaga (bekerja); dan
- Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Pada tahun 2021, beberapa program yang telah menjadi kesepakatan warga, sudah memasuki tahap pelaksanaan. Pembuatan selokan/drainase, SPAL serta sebagian Dana Desa pada tahun 2021 juga di alihkan pada penerima bantuan BLT dan bantuan Covid-19 berupa masker dan handsanitizer kepada masyarakat pinabetengan. Untuk program pemberdayaan masyarakat sendiri tidak jauh berbeda dengan program tahun sebelumnya yaitu Peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga, pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa yg dilaksanakn oleh pemerintah desa. Sebagai pekerjaan besar, masyarakat Desa Pinabetengan turut berperan dalam pelaksanaan program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Dana Desa itu sebagai mitra, koordinator dan pelaksana lapangan.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan informan di atas, disimpulkan bahwa tingkat Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa cukup tinggi, karena dengan adanya kemitraan, semangat gotong royong dan antusias masyarakat desa Pinabetengan dalam menyukseskan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat membuat pemerintah merasa terbantu dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan. Melihat masyarakat sudah mulai memahami bahwa program yang dibuat tidak lain untuk kepentingan masyarakat Desa Pinabetengan sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat terlibat dalam proses mengerjakan dan penyelesaiannya. Hal ini dapat terlihat dalam terlibatnya masyarakat setempat dalam pembangunan selokan/drainase dan SPAL. Gotong royong dilakukan di awal kegiatan, untuk selanjutnya terdapat beberapa tukang yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing untuk mengerjakannya. Para tukang ini juga merupakan warga yang berdomisili di Desa Pinabetengan.

Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah Desa Pinabetengan tak henti-hentinya memberikan informasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa itu sendiri, sehingga kepentingan bersama dapat terwujud.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini masyarakat ikut mengawasi dari laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan. Keterlibatan masyarakat dalam TPK menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan atau melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan swakelola. Agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tumpang tindih kewenangan, Tim Pengelola Kegiatan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu (a) tim perencana; (b) tim pelaksana; dan (c) tim pengawas.

Dalam tingkat partisipasi ini (kemitraan), maka otoritas yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta masyarakat dalam berbagai hal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Pada tingkat ini, pemerintah memperlakukan masyarakat layaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam menyusun, merancang sampai melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Masyarakat berhak untuk memberikan masukan, berbicara atau berunding dengan pemerintah atau pengambil keputusan, sehingga memperoleh kesepakatan bersama untuk saling membagi tanggungjawab, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pinabetengan.

Dari hasil wawancara kepada informan diatas dapat disimpulkan

bahwa pada tahap pelaksanaan evaluasi kerja, masyarakat desa pinabetengan ikut terlibat dalam Pembangunan Desa Pinabetengan sehingga dapat terlaksana dengan baik, hal ini tentu untuk mengingat peran masyarakat dalam tahap evaluasi suatu pembangunan sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan suatu program.

Pemerintahan saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di pedesaan, tujuannya supaya tercipta pembangunan yang merata dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu program pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini adalah pemberian bantuan Dana Desa bagi setiap desa di Indonesia. Tidak tanggung tanggung nominal Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia bisa mencapai Rp 1 miliar, dengan catatan disesuaikan dengan potensi dan kondisi desa di masing-masing wilayah. Desa Pinabetengan adalah salah satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah. Pada Tahun 2021 jumlah Dana Desa di Desa Pinabetengan sebesar Rp. 977.946.800.

Sasaran dari Dana Desa adalah seluruh desa definitif dalam wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa sebanyak 227 desa, termasuk Desa Pinabetengan Yang mana sasaran prioritas penggunaan Dana Desa sendiri adalah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Merujuk pada salah satu landasan inilah sehingga pemerintah Desa Pinabetengan menetapkan dan merumuskan rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk melangsungkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pemerintah Desa Pinabetengan memiliki beberapa sumber anggaran, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Secara garis besar terdapat tiga sumber anggaran pendapatan yang dimiliki Desa Pinabetengan, pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer yang di dalamnya meliputi (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan provinsi) dan sumber pendapatan lain-lain

Penutup

Kesimpulan

1. Pada tahap assessment atau dalam identifikasi masalah, terlihat Partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah paham terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.
2. Dalam tahap Alternative Program atau Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pinabetengan, yakni pembangunan infrastruktur tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah Desa melainkan dengan melakukan musyawarah melalui forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat berbagi aspirasi dan pendapat masyarakat untuk ditampung dan diolah kembali dengan memperhatikan aspek prioritas.
3. Dalam tahap pelaksanaan implementasi pembangunan infrastruktur, Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa cukup tinggi, karena melihat keadaan masyarakat Desa Pinabetengan yang memiliki budaya gotong royong yang kental dan masyarakat sudah memahami bahwa program yang dibuat tidak lain untuk kepentingan masyarakat Desa Pinabetengan sendiri.

4. Tingkat pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada tahap pelaksanaan evaluasi kerja cukup baik, masyarakat desa pinabetengan ikut terlibat dalam Pembangunan Desa Pinabetengan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat penulis sampaikan guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa yang ada di Desa Pinabetengan Kecamatan Tompaso Barat yaitu :

1. Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang sedang dan telah dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah.
2. Sebaiknya pembangunan infrastruktur di desa pinabetengan, terfokus dahulu kepada satu proyek pengerjaan agar supaya masyarakat lebih fokus terlibat kepada satu proyek pembangunan, karena apabila beberapa proyek

- dijalankan sekaligus akan menimbulkan masalah dalam pengerjaan.
3. Pemerintah harus mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan karena mengingat sebagian masyarakat terkadang banyak yang bekerja dan memiliki kesibukan masing-masing..
 4. Pemerintah harus selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar masyarakat dapat lebih berperan dalam mengawasi dan bersama-sama mengevaluasi setiap kegiatan, agar mengurangi tingkat kesalahan dalam suatu pengerjaan proyek pembangunan.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2007. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Adi, Isbandia Rukminto. 2010. *Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Conyers, Diana. 2011. *"An Introduction to Social Planning in The Third World"*. By Jhon Wiley & Sons Ltd. 1994. Terjemahan
- Djuretnaa Imam Muhni. 2005. *Moral dan Religi*. Yogyakarta: Kanisius
- Hasniati, Rabina dan Yunus. 2017. "Memperkuat Modal Sosial untuk Meningkatkan Partisipasi Dalam Sektor Publik". *Asian Journal of Applied Sciences* Volume 05 378, April
- Hamijoyo, Santoso S, 2008. *Pemikiran dan Implementasi Komunikasi Dalam Pengembangan Masyarakat Komunikasi Partisipatoris, Humaniora, Bandung*
- Koerten D., 2008. *Pembangunan desa*. Bandung: Pustaka Setia
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Mantra Bagus Ida. 2006. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marshal, Catherine & Gretchen B Rossman. 1995. *Designing Qualitative. Research*. California: Sage Publication Inc
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Ndraha, Talizuduhu. 2008. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Oakley A. 2010, *AnalisaKebijaksanaan Dar' FormulasiKe Implementasi Kebijakan Negara*, Malang: Bumi Aksara
- Kartasasmita, Ginanjar. 2007. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDEAS
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sastropoetro, Santoso R.A. 2008. *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sakaria, Nurlinah. 2017. "Strengthening Social Capital to Enhance ParticipationInPublic Sector". *Asian Journal of*

- Applied Sciences Volume
05 Issue 02, April
- Sastropoetro, Santoso R.A. 2008. *Partisipasi, Komunitas, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Soetrisno. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Soleman B. Taneko. 2006. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: RaJawali.
- Suryono, Agus. 2010. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Winardi Nugroho. 2009. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Sumber - Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa